# 

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

### Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 050/258/III.12/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 adalah :

-

#### Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian

#### Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Tahun 2023 - 2026 sebanyak satu sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET KINERJA PADA TAHUN** | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif | % Desa Mandiri | 39,69 | 41,22 | 42,75 | 44,27 | - |

### Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan PJ Bupati Lampung Barat Nomor : 050/259.A/III.12/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2023 - 2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **PENJELASAN** | | |
| **ALASAN** | **FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN** | **SUMBER DATA** |
|  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif | Persentase Pekon dengan Status Mandiri | % | Meningkatkan Status Pekon Mandiri di Lampung Barat | Jumlah Pekon mandiri dibagi jumlah pekon | IDM Kemendes dan PDTT Nomor 174 Tahun 2023 |

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat**

**Tahun 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| **1** | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif | Persentase Pekon dengan Status Mandiri | 39,69 |

## Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Tahun 2023, sebagai berikut :

### Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Tahun 2023

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Tahun 2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif | % Desa Mandiri | % | 39,69 | 41,22 | 43,51 | 45,04 |  |

### Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 2.5**

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **SATUAN** | **ALASAN** | **FORMULASI/CARA PENGUKURAN** | **SUMBER DATA** | **KETERANGAN/KRITERIA** |
| 1 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif | % Desa Mandiri | % |  | Jumlah Pekon Mandiri dibagi jumlah Pekon | IDM Kemendes dan PDTT Nomor 174 Tahun 2023 |  |

### Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan PJ Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **IKU / INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** |
|  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif | Persentase Pekon dengan Status Mandiri | % | 39,69 |

## PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. **PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**
2. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,** dengan kegiatan yang dilaksanakan :
   1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan sub kegiatan yang dilaksanakan :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** dengan sub kegiatan yang dilaksanakan
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD
      4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan sub kegiatan yang dilaksanakan
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan yang dilaksanakan
      1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5. **Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan sub kegiatan yang dilaksanakan
      1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA,** dengan kegiatan yang dilaksanakan :
   1. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**
      1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
      2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
      3. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
      4. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT,** dengan kegiatan yang dilaksanakan :
   1. **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupoaten/Kota**
      1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan(RT, RW, PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

## Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja (**PK**) adalah lembar/ **dokumen** yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masayarakt dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dalam penyusunan Pk di Dinas Pemberdayaan Masyarakt dan Pekon yang telah disusun dari yang murni ke perubahan terjadi hanya 1 kali perubahan. Dasar penyusunan PK Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmasi ( Permenpan RB ) No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KERANGKA PENDANAAN DINAS PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program/keg/subkegiatan** | **PAGU USULAN** | **PAGU SAAT INI** |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**  **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  **DESA. perencanaan** | 3.784.165.444 | 9,461,727,850 |
| Penyusunan Dokumen  Perencanaan Perangkat  Daerah |  |  |
| Koordinasi dan | 6,825,100 | 6,825,000 |
| Penyusunan Dokumen | 5,725,100 | 5,725,000 |
| RKA-SKPD | 3,764,900 | 3,765,000 |
| Koordinasi dan | 5,050,000 | 5,050,000 |
| Penyusunan Dokumen | 2,299,000 | 2,299,000 |
| Perubahan RKA-SKPD | 5,000,000 | 12,080,000 |
| **Administrasi Keuangan Perangkat**  **Daerah** |  |  |
| Penyediaan Gaji dan  Tunjangan ASN | 2,029,460,100 | 2,726,470,700 |
| Koordinasi dan  Penyusunan Laporan  Keuangan  Akhir Tahun SKPD | 3,110,000 | 3,110,000 |
| Koordinasi dan  Penyusunan Laporan  Keuangan  Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1,890,000 | 1,890,000 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2,510,000 | 2,510,000 |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  |
| Penyediaan Komponen  Instalasi  Listrik/Penerangan  Bangunan Kantor | 3,149,000 | 3,150,000 |
| Penyediaan Barang  Cetakan dan  Penggandaan | 31,846,600 | 45,495,000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5,010,000 | 3,150,000 |
| Fasilitasi Kunjungan | 5,355,000 | 98,294,000 |
| Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi dan Konsultasi skpd  **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | 66,589,000 | 45,495,000 |
| Penyediaan Jasa Surat  Menyurat | 6,440,000 | 6,440,000 |
| Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber  Daya Air dan  Listrik | 19,250,000 | 31,210,000 |
| Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor | 104,671,100 | 167,158,400 |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah**  **Penunjang Urusan Pemerintahan**  **Daerah** |  |  |
| Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya  Pemeliharaan, Pajak dan  Perizinan Kendaraan  Dinas Operasional atau  Lapangan | 91,250,000 | 186,455,200 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5,190,000 | 7,650,000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung  Kantor atau Bangunan Lainnya | 17,595,000 | 50,289,000 |
| **PROGRAM PENATAAN DESA** |  |  |
| **Penyelenggaraan Penataan Desa** |  |  |
| Fasilitasi Sarana dan  Prasarana Desa | 307,070,000 | 852,071,000 |
| **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA**  **DESA** |  |  |
| **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** |  |  |
| Fasilitasi Pembangunan  Kawasan Perdesaan | 39,459,000 | 209,459,000 |
| **PROGRAM ADMINISTRASI**  **PEMERINTAHAN DESA** |  |  |
| **Pembinaan dan Pengawasan**  **Penyelenggaraan Administrasi**  **Pemerintahan Desa** |  |  |
| Fasilitasi Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Desa | 61,030,500 | 240,030,500 |
| Fasilitasi Pengelolaan  Keuangan Desa | 79,958,000 | 79,958,000 |
| Pembinaan Peningkatan  Kapasitas Aparatur  Pemerintah Desa | 79,168,500 | 203,168,500 |
| Pembinaan dan  Pemberdayaan BUM Desa dan  Lembaga Kerja Sama antar Desa | 47,125,500 | 107,864,000 |
| Fasilitasi Evaluasi  Perkembangan Desa serta  Lomba Desa dan  Kelurahan | 49,999,900 | 390,380,000 |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA**  **KEMASYARAKATAN, LEMBAGA**  **ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** |  |  |
| **Pemberdayaan Lembaga**  **Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang**  **Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** |  |  |
| **Pemberdayaan Lembaga**  **Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang**  **Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** |  |  |
| Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan Lembaga  Kemasyarakatan  Desa/Kelurahan (RT, RW,  PKK,Posyandu, LPM, dan  Karang Taruna), Lembaga  Adat Desa/Kelurahan dan  Masyarakat Hukum Adat | 1.000.711.000 | 168,658,000 |
| Fasilitasi Pemerintah  Desa dalam Pemanfaatan  Teknologi Tepat Guna | 49,990,000 | 147,990,000 |
| Fasilitasi Bulan Bhakti  Gotong Royong Masyarakat | 84,515,000 | 120,640,000 |
| Fasilitasi Tim Penggerak  PKK dalam  Penyelenggaraan  Gerakan Pemberdayaan  Masyarakat dan  Kesejahteraan Keluarga | 102,884,500 | 412,863,000 |

**C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target 2022** | **Target 2023** |
| **1** | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif | Persentase Pekon dengan Status Mandiri | 11,45 | 39,69 |

## Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa ada peningkatan target di tahun 2023 sebesar 39,69% dibandingkan dengan target tahun 2022 (11,45%).